

## Salurkan Rp6,8 Miliar untuk Pengamanan Pilkada



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,05/04/2024

**BONTANG** – Dana hibah dari Pemkot Bontang untuk pengamanan Pilkada serentak diserahkan kepada Polres Bontang dan Kodim 0908. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Wali Kota Bontang Basri Rase menyebut, anggaran untuk Polres Bontang yakni Rp5,3 miliar. “Kalau untuk Kodim 0908 sebesar Rp1,5 miliar,” sebutnya. Bila dikalkulasi, total anggaran yang disalurkan sekitar Rp6,8 miliar.

Ia berharap, pesta demokrasi yang diadakan pada November dapat berjalan lancar dan kondusif. Terutama dengan perbedaan yang ada, gesekan sosial di masyarakat pun harus diminimalisasi lewat penguatan pengamanan. “Maka perlu sinergi antara *stakeholder* terkait dalam pelaksanaannya,” tutur dia.

Diketahui, tahapan Pilkada kini memasuki pendaftaran pemantau pemilihan. Pendaftaran calon pasangan dalam Pilkada baru dimulai 27 Agustus. Sementara pelaksanaan pemungutan suara bakal berlangsung 27 November 2024. “Adanya dana ini diharapkan dapat bermanfaat, terkhusus untuk pengamanan nantinya,” pungkasnya. **(kpg/ind/k8)**

### Sumber berita:

1. Kaltimpost, Salurkan Rp6,8 Miliar untuk Pengamanan Pilkada, 05/04/24

### Catatan:

1. Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
  - b. berkedudukan di daerah;
  - c. memiliki sekretariat/kantor dan aktif;
  - d. tidak terjadi konflik internal;
  - e. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
  - f. memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok orang;
  - g. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara rutin;
  - h. pengajuan permohonan bantuan hanya boleh satu proposal untuk satu alamat;
  - i. memiliki surat keterangan domisili dari jauh.